

RINGKASAN

Teori yang sejalan dengan dasar negara Indonesia adalah teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Negara Kesejahteraan (*welfare state*) tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Gizi buruk merupakan masalah yang masih menjadi perhatian dunia hingga saat ini, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Gizi buruk pada balita, membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan fisik maupun mental, yang selanjutnya akan menghambat prestasi belajar. Selain itu juga menjadi beban negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam tanggungjawab menanggulangi gizi buruk yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Bab XI mengenai Penanggulangan Masalah Gizi menjelaskan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah terhadap status gizi masyarakat. Capaian pemerintah dalam bidang pembangunan kesehatan saat ini tetap harus didukung dengan upaya-upaya terobosan inovatif untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai. Kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Ciamis bersifat multi faktor, kerjasama lintas sektoral diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi gizi buruk di Kabupaten Ciamis.

Metode pendekatan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitik. Sumber data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel hukum. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gizi buruk pada balita di Kabupaten Ciamis yaitu asupan gizi, pendapatan keluarga, pendidikan ibu, penyakit infeksi, sanitasi lingkungan, dan pelayanan kesehatan dasar. Selain itu tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Ciamis didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dalam Bab XI mengenai Penanggulangan Masalah Gizi yaitu dengan melakukan program-program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Keluarga Sadar Gizi (KADARZI), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), inovasi Rantai Emas, Gerakan Cegah Stunting, Sijaga, Gumelis dan pada 2021 ada gerakan DeBes (Desa Bebas Stunting), serta gerakan posyandu peduli stunting. Kendala yang dihadapi dalam penanganan gizi buruk pada balita di Kabupaten Ciamis pertama karena anggaran yang terbatas dengan jumlah balita gizi buruk yang tinggi, kedua karena faktor sosial ekonomi masyarakat, dan ketiga pengetahuan orang tua (ibu) yang kurang.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, Gizi buruk, Tanggung Jawab

SUMMARY

The theory of the Welfare State is the theory which is in line with the basis of the Indonesian state. The welfare state is reflected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, that the Government protects the entire nation and all spills of blood, advances general welfare and educates the nation's life. Malnutrition, especially in developing countries, including Indonesia, is a problem that is still of concern to the world today. Poor nutrition has a detrimental effect on physical and mental development in kids under five, which can impede learning achievement. Aside from that, both directly and indirectly, it is also a burden on the economy. In the duty to tackle malnutrition, local governments have a legal basis, namely Ciamis District Regulation No. 20 of 2011 on Health Implementation, which defines the responsibilities of local governments to the nutritional status of the population in Chapter XI on Overcoming Nutritional Problems. Innovative breakthrough efforts to accelerate the gains must accompany the successes of the current government in the health development sector achieved. The barriers faced by the Ciamis Regency government are multi factor, and cross-sectoral cooperation is required to assist the government in overcoming Ciamis Regency malnutrition.

The approach methods are normative juridical, descriptive analytic research specification. Secondary data sources, including statutory regulations, text books, legal dictionaries, legal journals, legal articles. Data collected using literature analysis, presented systematically organized as narrative text, and analyzed using qualitative methods.

The results showed that the factors affecting malnutrition among children under five in Ciamis Regency were nutritional intake, family income, maternal education, infectious diseases, environmental sanitation, and basic health services. In addition, the responsibility of the local government of Ciamis Regency is based on the Ciamis Regency Regional Regulation No. 20 of 2011 concerning Health Implementation in Chapter XI concerning Overcoming Nutritional Problems, specifically by carrying out programs such as Supplementary Food (PMT), Infant and Child Feeding (PMBA), Healthy Living Community Movement (GERMAS), Nutrition-Conscious Family (KADARZI), Youth Care Health Service (PKPR), Golden Chain innovation, Movement to Prevent Stunting, Sijaga, Gumelis and in 2021 there will be the DeBes movement (Stunting Free Village), and the integrated health post movement that cares about stunting. The barriers to handling malnutrition in children under five in the Ciamis Regency are firstly due to a limited budget with a high number of malnourished children under the age of five, secondly due to socio-economic factors in society, and thirdly due to lack of parental knowledge (mothers).

Keywords : Local Governments, Poor Nutrition, Responsibility